



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO**

Jalan Raya Jogoroto No 01 Ds. Jogoroto Telp. (0321) 860486
JOGOROTO



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN JOGOROTO

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

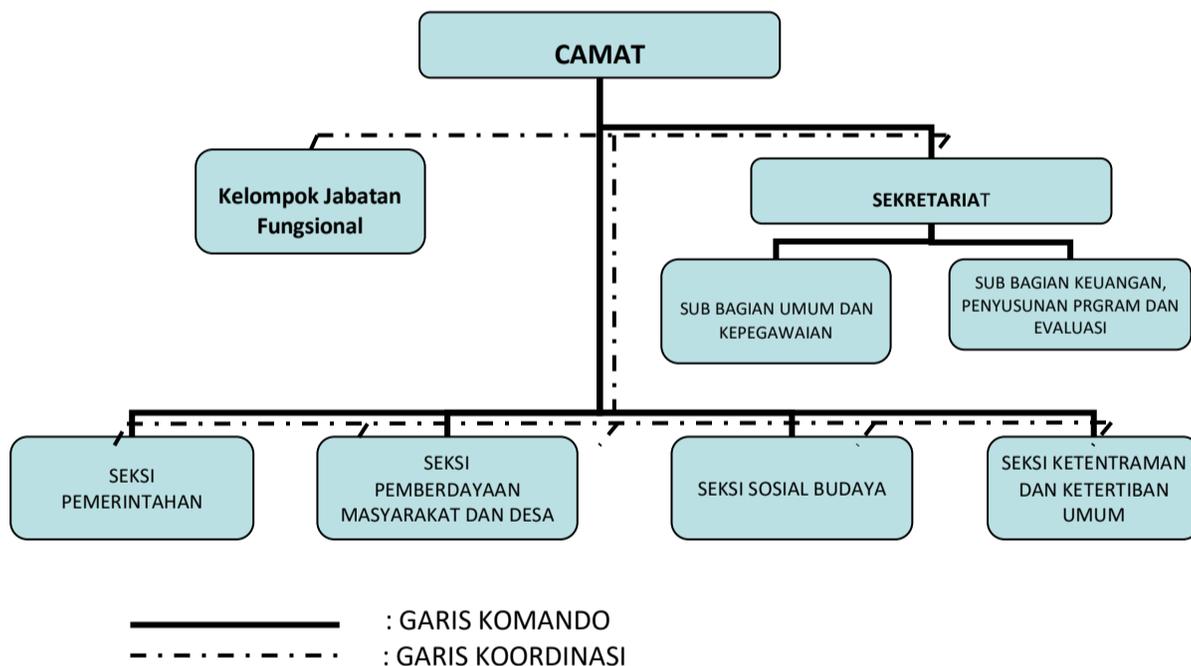
1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Kehumasan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Jogoroto tersaji sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jogoroto



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Jogoroto dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 3erti, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Menghimpun data 3erti dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi 4ertical di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi 4ertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan 6ertic dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi 6ertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jogoroto juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Jogoroto merupakan kawasan dengan tipologi pertanian dan Perkebunan menuju pengembangan wilayah Pariwisata. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja serta mendongkrak perekonomian lokal.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

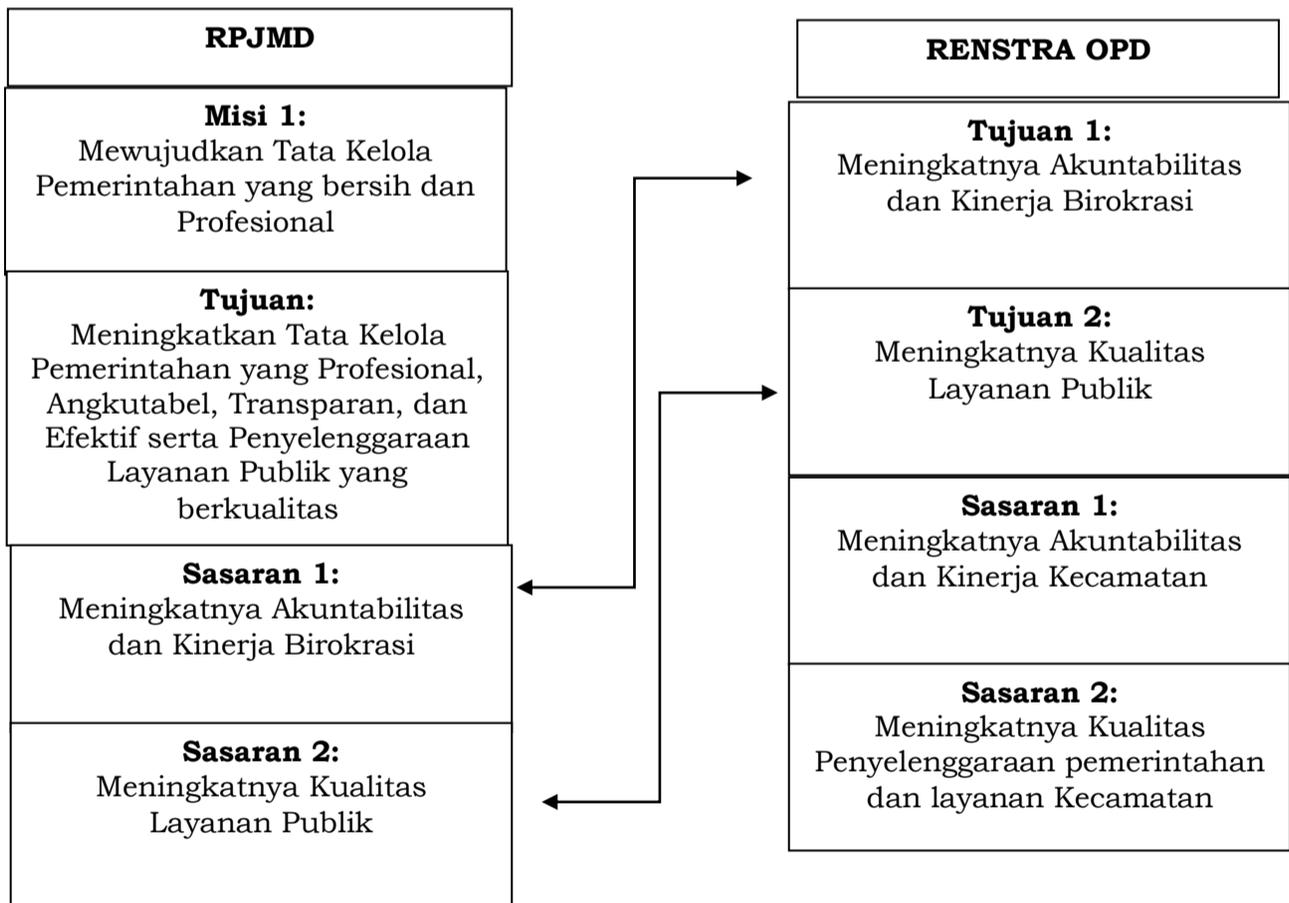
1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Jogoroto menjadikan kebutuhan Kecamatan Jogoroto belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Jogoroto masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4. CASCADING

Tujuan dan Sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Jogoroto. Berdasarkan RPJMPD Provisinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jogoroto terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Bersih dan Profesional.

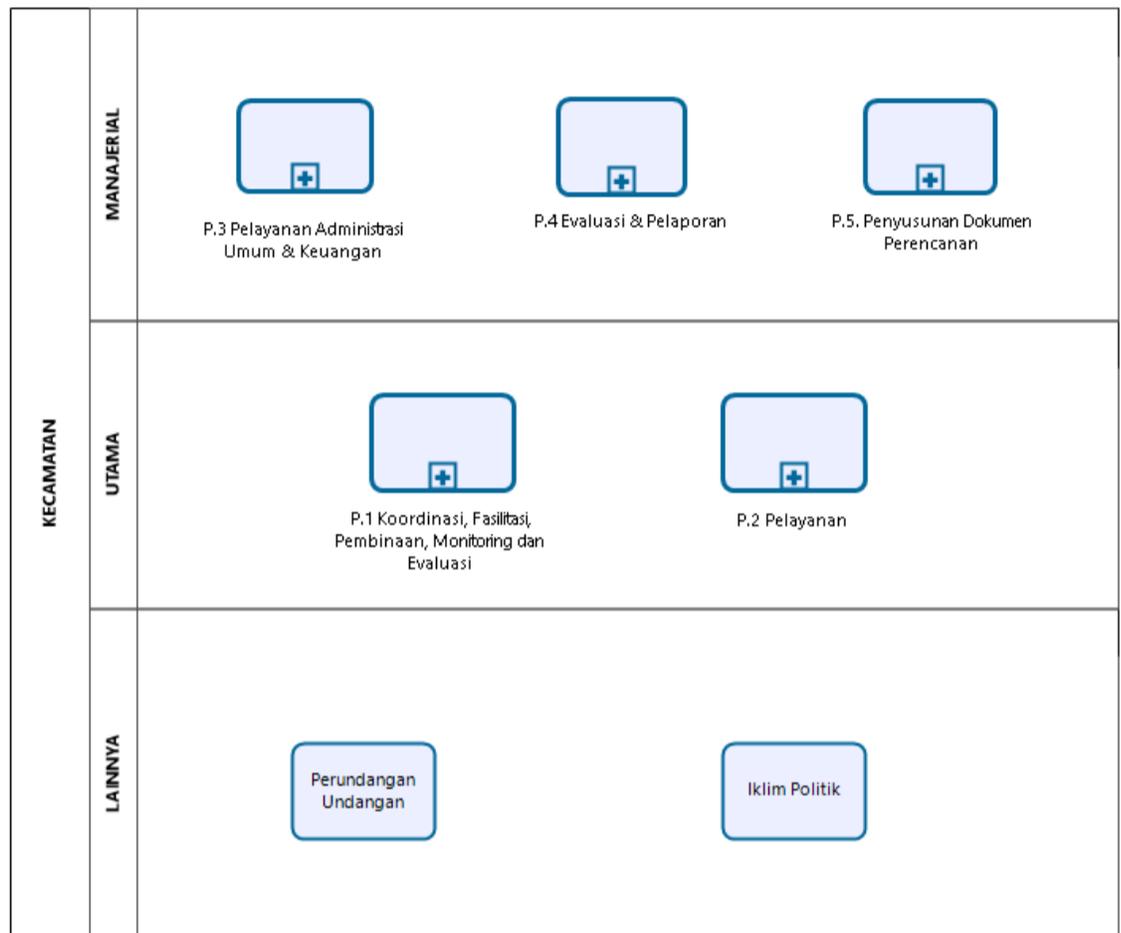
Indikator Tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Indeks Good Government. Kecamatan Jogoroto mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.



1.5. PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Jogoroto telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Jogoroto dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.



Powered by
bizagi
Modeler

P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain
- *Evaluasi dan Pelaporan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang dijalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

2. Core Utama

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tuisi kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

3. Core Lainnya

- Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Selama Tahun 2022 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto secara keseluruhan dan IKU yang Kedua Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Jogoroto, telah tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni 96,51%.

Meski Demikian Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang dimulai pada Tahun 2022 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jogoroto untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target dan Nilai Sinergitas yang masih belum sesuai pada Tahun 2022.

2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang yaitu Berkarakter dan Berdaya Saing.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2 PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Rencana Kinerja Kecamatan Jogoroto pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2022.

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian

Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Jogoroto atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Jogoroto untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Jogoroto	1. Nilai SAKIP	70,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	2. IKM Kecamatan Jogoroto	90,50
		3. IPP Kecamatan Jogoroto	3,5
		4. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %
		5. Prosentase Laporan pelanggaran perda/perkada, dan trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait di Kecamatan Jogoroto	100 %
		6. Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100 %

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	85%	26,05 %	51,70 %	75,85 %	100 %	2,296,500
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	35,42 %	45,83 %	89,58 %	100 %	14,783,800
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Laporan Kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100 %	24,00 %	48,00 %	73,67 %	100 %	4,065,800
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Raperdes APBDesa/P-APBDesa yang di evaluasi	100	65,50 %	75,00 %	87,50 %	100 %	18,257,500

			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Desa yang di Evaluasi	100%	22,50 %	50,00 %	75,00 %	100 %	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	10,00 %	43,33 %	56,67 %	100 %	0
			Prosentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100 %	
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	85,00 %	48,61 %	70,83 %	85,42 %	100 %	2,562,328,531
Jumlah									2,601,732,131

Pihak Kedua
BUPATI JOMBANG

Hj. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang,
Pihak Pertama
**Kepala OPD
KABUPATEN JOMBANG**



NUNIK HIDAYATI, ST
Pembina Tk I
NIP. 196908141997032003

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Jogoroto dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Jogoroto	CAMAT JOGOROTO
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jogoroto	IKM Kecamatan Jogoroto tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Jogoroto	CAMAT JOGOROTO
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Jogoroto	IPP Kecamatan Jogoroto tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Jogoroto	CAMAT JOGOROTO
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD/instansi terkait ----- ----- x 100 % Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT JOGOROTO
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- ----- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT JOGOROTO
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT JOGOROTO

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Jogoroto telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran
Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub
Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd ----- -----x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan ----- ---x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ----- ----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ----- ----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Jogoroto yang difasilitasi	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Jogoroto yang di fasilitasi tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian ----- ----x100 Pelayanan administrasi kepegawaian yang ditargetkan

	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	16 stel	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ----- ---x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	6 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	-	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	24 buku	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	7.850 lembar	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana ----- ---x100 Pengadaan sarana dan prasarana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	5 unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah ----- --x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	3 jenis	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik ----- --x100

					Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara tahun n
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jogoroto yang dipelihara	1 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jogoroto yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	40 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jogoroto yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	85,1	Nilai PATEN Kecamatan Jogoroto Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ----- --x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan adminduk yang diverifikasi ----- -----x100% Jumlah pengajuan Adminduk
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi ----- -----x100% Jumlah pengajuan perizinan
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA ----- -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----- -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n

	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait ----- -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes ----- -----x100% Jumlah Desa
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ----- -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----

					-----x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembag a	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	22 dokum en	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembag a	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan diDesa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	22 dokum en	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	11 BUMDe s	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	11 TP- PKK	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n

BAB III

AKUNTABILITAS DAN KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jogoroto diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2022, Kecamatan Jogoroto memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jogoroto tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jogoroto Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	71,00	70,89	99,84
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Jogoroto	85,00	97,53	114,74
	IPP Kecamatan Jogoroto	3,5	2,27	64,85
	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian IKU				96,57%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 kurang berhasil namun masih di angka yang baik yaitu sebesar 96,57% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 71,00 telah tercapai 70,89 dengan tingkat capaian 99,84% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/313/415.67/2022 tanggal 30 September 2022
2. IKM Kecamatan Jogoroto ditargetkan 85,00 telah tercapai 97,53 dengan tingkat capaian 114,74%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Jogoroto ditargetkan 3,5 telah tercapai 2,27 dengan tingkat capaian 64,85%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100 % tercapai 100 % dengan tingkat capaian 100 %. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut

dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Jogoroto telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Jogoroto telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

Meskipun telah hampir memenuhi target namun segala usaha Pencapaian Target dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Jogoroto Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	96,57%

Meskipun secara Indikator umum belum memenuhi target, namun secara individu dan Kegiatan sebagian besar telah memenuhi target, berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,11%	100,11%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup	14 bulan	14 bulan	100%

			Kecamatan Jogoroto yang difasilitasi			
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	6 jenis	6 jenis	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	-	-	-
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	25 buku	25 buku	100%
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	6500 lembar	6500 lembar	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%

Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	5 unit	5 unit	100%	
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	100%	100%	100%	
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	17 stel	17 stel	100%	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%	
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	3 jenis	3 jenis	100%	
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	

		pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajakdan perizinkendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	9 unit	9 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jogoroto yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	8 unit	8 unit	100%
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	84,5	88,33	104,53%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%

		diTingkat Kecamatan				
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%

	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah				
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 dokumen	22 dokumen	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 laporan	22 laporan	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%

			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	22 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	22 dokumen	22 dokumen	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	22 lembaga	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	22 dokumen	22 dokumen	100%
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	11 BUMDes	11 BUMDes	100%
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	11 TP-PKK	11 TP-PKK	100%

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto
2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Jogoroto

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian IKU
Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	IKU	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Jogoroto	Nilai	74 (B)	74,94	127 %						
2	Nilai SAKIP Kecamatan Jogoroto	Nilai	62.05 (B)	69,16	114 %	70,01	70,35	101,19 %	71,00	70,89	99,84 %
3	Nilai IKM Kecamatan Jogoroto	Nilai				83,00	88,13	106,18 %	85,00	97,53	114,74 %
4	Nilai IPP Kecamatan Jogoroto	Nilai				3,10	3,511	113,25 %	3,5	2,27	64,86 %
5	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	Persen				100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	Persen				100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.	Persen				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian IKU					N/A			103,44 %			96,57 %

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa secara umum capaian indikator kinerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun dapat di identifikasi karena Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak tahun 2021 s/d 2022 dapat diukur karena sama target dan indikatornya.

Untuk analisis pencapaian pengukuran kinerja masing-masing kegiatan selama tahun 2020, 2021, 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2020		%	2021		%	2022		%
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	22	22	100						
2	Pembangunan gedung Kantor	Luas gedung kantor yang di bangun	m 2	63 m2	62 m2	100						
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	10 Unit	10 Unit	100						
3	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya	Jumlah Luas gedung kantor/bangunan pendukung yang dipelihara	m 2	36 m2	36 m2	100						
4	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	5 Unit	5 Unit	100						
5	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit	3 Unit	3 Unit	100						
6	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan PDH Pegawai	Stel	21 Stel	-	-						
7	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	-	-	-						
8	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100						
9	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100						
10	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD Kec. Jogoroto yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100						

11	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Komponen	8	8	100							
12	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Komponen	11	11	100							
13	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Sosial Budaya	Komponen	16	16	100							
14	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Pemerintahan dan Umum	Komponen	22	22	100							
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun se Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam suai aturan	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100
18	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100
19	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100	100

21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
22	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Persen				100%	100%	100	100%	100%	100
23	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Dokumen				22 Dokumen	22 Dokumen	100	22 Dokumen	22 Dokumen	100
		Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga				11 Lembaga	11 Lembaga	100	11 Lembaga	11 Lembaga	100
2425	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan				3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	laporan				11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	11 Laporan	100
		RATA RATA CAPAIAN SELURUH KEGIATAN	N/A			N/A			100			100

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada Dokumen Renstra**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	71,00	70,89	99,84%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IPP Kecamatan Jogoroto	3,50	2,27	64,85%
	IKM Kecamatan Jogoroto	85,00	97,28	114,74%
	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/Perubahan APB Desa Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja				96,57%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan, target periode akhir renstra 72,00 pada tahun 2022 telah tercapai 70,89.
2. IKM Kecamatan Jogoroto telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 114,47%, target akhir periode renstra adalah 85 pada tahun 2022 telah tercapai 97,53
3. IPP Kecamatan Jogoroto telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 64,85%, target akhir periode renstra 4 pada tahun 2022 telah tercapai 2,27
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

3. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan 5 (lima) indikator yang pertama Nilai SAKIP telah memenuhi Target dari target yang ditetapkan 71,00 terealisasi 70,89 dengan Capaian 99,84%. Untuk Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu nilai IPP Kecamatan Jogoroto masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,5 dimana terealisasi 2,27 dengan persentase capaian hanya 64,85%, hal ini disebabkan salah satunya adalah perubahan komposisi personil pelayanan di Kecamatan Jogoroto. Untuk Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu nilai IKM Kecamatan Jogoroto telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,00 dimana terealisasi 97,53 dengan persentase capaian 114,47%. Sedangkan untuk indikator kinerja Utama yang kelima, enam dan tujuh masing-masing telah memenuhi target yakni sebesar 100%

Total Rata-rata Capaian 5 (lima) IKU tersebut di tahun 2022 adalah 96,57%.

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Jogoroto tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.7
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2022

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	70,50	70,89	100,55	2.279.556.391	2.211.932.253	97,03
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00	2.279.556.391	2.218.554.672	97,32
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00	2.019.500	1.475.500	73,06
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	2.131.758.090	2.083.072.945	97,71
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	100%	100,00	657.000	657.000	100,00
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	5.100.000	5.100.000	100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00	22.922.825	22.917.825	99,97
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100,00	6.708.000	6.000.000	89,44
Kegiatan: Pengadaan bangunan gedung kantor	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor	100%	100%	100,00	-	-	-

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100,00	72.050.000	65.592.103	91,03
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100,00	38.340.976	33.739.300	87,99
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan Jogoroto	84,50	89,28	105,66	2.412.500	1.239.000	51,35
	2. Nilai IPP Kecamatan Jogoroto	3,5	2,27	64,85			
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,00	81,36	195,71	2.412.500	1.239.000	51,35
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100,00	2.412.500	1.239.000	51,35
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100,00	32.182.500	21.757.500	67,61
	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga			
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	11 Desa	11 Desa	11 Desa	32.182.500	21.757.500	67,61
	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga			
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	12.687.500	7.437.500	58,62
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00			

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12.687.500	7.437.500	58,62
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	-			
Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100 %	100 %	100 %	4.173.800	3.013.350	72,20
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.173.800	3.013.350	72,20
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100 %	100 %	100 %	10.185.850	5.447.450	53,48
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %			
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	10.185.850	5.447.450	53,48
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN					2.341.198.557,00	2.257.449.472,00	96,42

Adapun kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian serta Penunjang dalam mewujudkan sasaran tersebut diantaranya sebagai berikut :

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Jogoroto, Lintas Sektor Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Jogoroto untuk mencapai tujuan organisasi.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai yang mempengaruhi terhadap kurangnya budaya Kinerja dalam mewujudkan dan meningkatkan nilai Sistem akuntabilitas Kinerja (SAKIP) .

- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah relevan di karenakan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah diserahkan kewenangannya pada Kecamatan serta memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Jogoroto sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2019-2023 Kecamatan Jogoroto yakni: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Jogoroto melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Jogoroto langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Jogoroto melaksanakan setiap kerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome

yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	100,55%	97,32%	2,54%
2	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	97,32%	2,68%
3	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100,00%	73,06%	26,94%
4	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	95,72%	4,28%
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100,00%	100,00%	0,00%
5	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	0,00%
6	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	99,97%	0,03%
7	Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	84,44%	15,56%
8	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	91,03%	8,97%
9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100,00%	87,99%	12,01%
10	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan Jogoroto	114,74%	90,75%	39,39%
		2.Nilai IPP Kecamatan Jogoroto	64,85%		
11	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,86%	51,36%	45,5%
12	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100,00%	96,86%	3,14%
13	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100,00%	67,61%	32,39%

		2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	100,00%		
14	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	100,00%	67,61%	32,39%
		2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100,00%		
15	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100,00%	58,62%	41,62%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00%		
16	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	100,00%	58,62%	41,62%
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	0,00%		
17	Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100,00%	72,20%	27,20%
18	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	100,00%	72,20%	27,20%
19	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100,00%	53,48%	46,52%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100,00%		
20	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100,00%	53,48%	46,52%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BERDASARKAN REALISASI PER KEGIATAN			100,00%	96,42%	3,58%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BERDASARKAN REALISASI IKU			96,51%	96,42%	0,09%

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2022			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (71)	70,89	99,84%	19	4	21%	79,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Jogoroto	85,00	97,47	114,47%	10	5	50%	50
	IPP Kecamatan Jogoroto	3,5	2,27	64,85%				50
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	6	3	50%	50
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	6*	4*	50 %	50
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4	2	50%	50
RATA - RATA CAPAIAN IKU				96,58%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		36,83	59,73%

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 59,73 dimana dari 45 anjab ABK Kecamatan Jogoroot ketersediaan SDM adalah 15 dengan persentase ketersediaan 36,83 % dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja yaitu 96,57%.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Meningkatkan kualitas layanan publik**, Kecamatan Jogoroto menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	Prosentase
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.279.556.391	2.218.554.672		97,32
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	2.019,500	1.475.500		73,06
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.131.758.090	2.083.072.945		97,71
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	657.000	657.000		100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.100.000	5.100.000		100,00

Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	22.922.825	22.917.825		99,97
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%				
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	72.050.000	65.592.103		91,03
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	38.340.976	33.739.300		87,99
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,00	2.412.500	1.239.000		84,
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	2.412.500	1.239.000		51,35
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	21.757.500	32.182.500		67,61
	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	22 Lembaga				
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	11 Desa	21.757.500	32.182.500		67,61
	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 Lembaga				
Program: Penyelenggaraan Urusan	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	12.687.500	7.437.500		58,62

Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%				
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 dokumen				
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	12.687.500	7.437.500		58,62
Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	12 Laporan	45.242.200	45.142.650		99,78
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	12 Laporan	45.242.200	45.142.650		99,78
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100 %	9.198.500	5.548.500		60
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	12 Laporan				
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100 %	9.198.500	5.548.500		60,32
JUMLAH			2.341.198.557,00	2.257.449.472,00		96,42

Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jogoroto Tahun 2022, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program dan 12 kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan

dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022 ini Kecamatan Jogoroto mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.279.556.391 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.211.932.253 atau serapan dana APBD mencapai 96,42% sehingga dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran silpa

Tabel 3.11
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Jogoroto Tahun 2022

NO	Kategori	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1.	Telah memenuhi Target	2	96,68%	Rp. 2.211.932.253	96,42%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah efektif Secara Indikator Per Kegiatan hal tersebut dikarenakan penetapan target pada IKU Nilai Sinergitas sudah sesuai, Sedangkan penyerapan anggaran kinerja sebesar 96,42% telah menghasilkan kinerja yang sangat baik dari target sebelumnya namun secara indicator Per Kegiatan sudah memenuhi target dari penyerapan anggaran kinerja sebesar 96,42% telah menghasilkan kinerja yang telah mendekati target capaian sebesar 96,57% jadi terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,05%.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Nasional.

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi SAKIP, IPP dan IKM Kec. Jogoroto dengan Skala Nasional

Uraian	Realisasi Kec Jogoroto	Realisasi Nasional	% Perbandingan dg Nasional
Nilai SAKIP	70,89	67,93	95,82 %
Nilai IPP	2,27	3,88	58,50%
Nilai IKM	97,53	88,19	110,59%

Sumber: - data Laporan Kinerja Kemenpanrb tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Jogoroto tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2022 Standart Nasional niainya sudah mendekati dengan rincian pada tahun 2022 Nilai SAKIP Kecamatan 70,89 (BB) sedangkan nilai SAKIP Nasional 67,93 ada selisih kurang sekitar 2,96 Poin. Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 2,27 sedangkan Nilai IPP rata rata nasional sebesar 3,88 dengan selisih kurang sebesar -1,61 poin. Sedangkan untuk Pencapaian Nilai IKM/SKM Kecamatan Jogoroto tahun 2021 sebesar 97,53 sedangkan nilai SKM rata-rata Nasional sebesar 88,19 atau lebih tinggi 9,34 poin.

3.3 TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI

Nilai SAKIP Kecamatan Jogoroto pada tahun 2022 Berdasarkan LHE dari Tim Evaluasi Kabupaten nomor X.700/318/415.15/2022 tanggal 30 September sebesar 70,89 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30 %	25,69
b	Pengukuran Kinerja	30 %	22,67
c	Pelaporan Kinerja	15 %	6,91
d	Evaluasi Kinerja	25%	15,63
Hasil Evalausi Akuntabilitas Kinerja			70,89

Dalam poin a s/d d menyajikan dapat di simpulkan bahwa :

1. Pemenuhan atas kualitas penilaian kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandate kebijakan, namun target Perencanaan Kerja belum

memenuhi sebagai kriteria target yang baik, dan monitoring Renstra blum ada jadwal, mekanisme atau SOP.

2. Pengukuran Kinerja sebagai dasar pemberian TPP, dan sudah ada rekapitulasi kinerja dilampirkan dalam pemberian Reward and Punishment namun belum didapati standar yang terukur.
3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra dan belum meginfokan efisiensi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kompeten
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dan beluam menggunakan teknologi informasi (aplikasi)

3.4 MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI

Rekomendasi/saran dari Tim evaluasi SAKIP Kabupaten yang Utama dan penting untuk di tindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Uraian Rekomendasi	Tindak Lanjut	Progres
1	Target Perencanaan Kinerja	Dalam menentukan target perencanaan Kinerja dibuat dengan perhitungan yang logis, realistis dan berdasarkan basis data yang menitik beratkan pada komponen yang dijadikan dasar kenaikan target indikator.	Menerapkan Fungsi Managament Reward dan Punishment dan mengevaluasi SOP pengumpulan data untuk disesuaikan dengan target kinerja	Penentuan target Kinerja sudah disesuaikan dengan target dlam Perencanaan dan berdasarkan asas realistis dan logis sesuai Sumberdaya yang ada.
10	Revisi Target	Agar memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra dengan menampilkan secara spesifik tindak lanjut hasil monitoring	Rekomendasi sudah dilakukan melalui pemberihan arahan secara lesan dalam forum evaluasi internal OPD	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi (Bukti Dukung Dokumen Rapat Evaluasi Internal)
3	Menyusun SOP Monev Renstra	Segera menyusun dan berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Jombang tentang mekanisme /SOP untuk monitoring Renstra	Rekomendasi sudah dilakukan dan sudah disusun SOP Monev Renstra	Sudah dilaksanakan (Bukti dukung Dokumen SOP MOnev Renstra)
4	SK Reward dan Punishment	Agar memperbaiki SK Reward dan Punishment atas penilaian kerja	Rekomendasi sudah dilakukan dan SK Reward	Sudah disusun SK Reward dan

		pegawai agar menambahkan pengukuran yang rinci pada target kinerja pegawai yang diperjanjikan untuk digunakan sebagai salah satu kriteria penetapan serta dibuatkan standar yang jelas atas pengukuran ketepatan waktu.	dan Punishmen sudah menyajikan Data dasar penetapan.	Punishment (Bukti : SK CAMAT)
5	LKJIP menyajikan Langkah-langkah Kongkret	Agar pada dokumen Laporan Kinerja melampirkan upaya nyata (program/kegiatan) dalam tindak lanjut pemecahan masalah serta langkah-langkahnya.	Sudah disesuaikan dengan Rekomendasi	Dokumen LKJIP sudah menyajiakn Langkah-langkah pemecahan masalah
6	LKJIP Menyajikan Efisiensi SDM	Menambahkan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana yang memadai	Dilakukan Penyesuaian penyajian dokumen LKJIP TH 2022	Dokumen LKJIP Sudah Tersusun

BAB IV PENUTUP

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Jogoroto berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Jogoroto .

Laporan kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Jogoroto.

Selama Tahun 2022 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto secara keseluruhan dan IKU yang Kedua Meningkatnya

Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Jogoroto, Telah tercapai pencapaian kerjanya dengan baik yakni 96,51%.

Meski Demikian Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan perodesasi Renstra yang dimulai pada Tahun 2022 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jogoroto untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

3. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target dan Nilai Sinergitas yang masih belum sesuai pada Tahun 2021.
4. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jogoroto Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang yaitu Berkarakter dan Berdaya Saing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jogoroto diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Jogoroto kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Jogoroto, 27 Januari 2023

Kepala OPD
Kabupaten Jombang



Nunik Hidayati, ST

Pembina TK I

NIP. 196908141997032003